

ABSTRAK

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Provinsi Jawa Barat karena daerah ini merupakan salah satu daerah penghasil cukai yang besar dan potensial. Dengan penerimaan yang besar tersebut akan diiringi juga dengan tanggung jawab dan risiko yang besar terhadap penggunaan anggaran tersebut, dimana penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diperbaharui setiap tahunnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan DBH CHT oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam rukun waktu tahun 2020-2022 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut DBH CHT tahun 2020-2022.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Subyek dalam penelitian adalah SKPD yang terkait dengan DBH CHT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian dan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Garut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang berlaku pada tahun penelitian, dimana di dalam setiap tahunnya ditemukan permasalahan penggunaan yang perlu kesesuaian dengan peraturan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengalokasian dan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Garut masih terdapat permasalahan penggunaan dan penyerapannya yang perlu penyesuaian dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Kata Kunci: Analisis, DBH CHT, Desentralisasi, Kab. Garut, Kebijakan

ABSTRACT

Garut Regency is one of the regions receiving Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) in the West Java Province, as this area is one of the largest and potential regions producing excise goods. This large revenue will also be accompanied by a large amount of responsibility and risk in the use of the budget, where the use of the budget must be in accordance with the Ministry of Finance's Regulation on the use of the Tobacco Product Revenue Sharing Funds and the Misuse of Allocation Funds for Tobacco Product Revenue Profits updated annually. The problem in this study is how the allocation and use of DBHCHT by the Garut Regency Government for the period 2020 to 2022 is consistent with the Ministry of Finance's Regulation on the Use of Tobacco Excise Profit Sharing Funds and the Misuse of Allocation Funds for Tobacco Excise Profit Sharing Funds. The objective to be achieved in this study is to determine the allocation and use of DBHCHT in accordance with these Regulations between 2020 and 2022.

This type of research is qualitative. Subjects in the study were DBHCHT related SKPD within the Garut Regency Government. Data collection is based on interview method, literature study and documentation. The results showed that the allocation and use of DBHCHT in Garut Regency was based on the Ministry of Finance Regulation concerning the use of the Tobacco Product Profit Sharing Funds and the Misuse of the Allocation of the Tobacco Product Profit Sharing Fund Allocation in effect during the study year, where in each year there were problems of use that were found, regulatory compliance is required. The conclusion of this study is that the allocation and use of DBHCHT in Garut Regency still has problems in the use and absorption that must be adjusted with the Ministry of Finance Regulation on the use of the Tobacco Product Revenue Sharing Funds and sanctions for the misuse of the Tobacco Product Revenue Sharing Fund.

Keywords: *Analysis, DBH CHT, Decentralization, Garut Regency, Policy*